



Bahasa sebagai Representasi Kekuasaan dalam Analisis Wacana Kritis Teks Politik

Fitri Damayanti^{1*}, Siti Nurjanah²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: fitridamayanti@unram.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

20 December 2025

Manuscript revised:

24 January 2026

Accepted for publication:

31 January 2026

Abstract

This study investigates how language functions as a medium of power representation within political texts through the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA). Political discourse often embeds ideological structures that influence public perception, construct dominance, and legitimize authority. The purpose of this research is to analyze linguistic features and discursive strategies used in selected political speeches to uncover implicit power relations. Utilizing a qualitative descriptive design, this study adopts Fairclough's three-dimensional CDA framework, focusing on textual analysis, discourse practice, and sociocultural context. Data were collected from three political speeches delivered during national political events in Indonesia and were analyzed through coding, thematic classification, and interpretive discourse analysis. Findings indicate that lexical choices, modality, metaphors, and intertextuality are strategically employed to naturalize political ideologies, strengthen authority, and shape collective identities. The study concludes that political texts do not merely communicate information but actively construct and maintain power structures. These findings highlight the importance of CDA in fostering critical awareness of language use in political communication and encourage further research on multimodal political discourse.

Keywords

critical discourse analysis;

political text;

power representation;

ideology;

language and politics

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Damayanti, F., & Nurjanah, S. (2026). Bahasa sebagai Representasi Kekuasaan dalam Analisis Wacana Kritis Teks Politik. *Journal of Language Studies*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.70716/jols.v2i1.183>

Pendahuluan

Bahasa telah lama dipahami bukan sekadar sebagai medium pertukaran pesan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang beroperasi melalui praktik wacana dalam berbagai konteks sosial (Fairclough, 2015). Dalam ranah politik, bahasa berfungsi lebih kompleks karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai realitas, membentuk keyakinan, serta mengonstruksi relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat. Para ahli wacana menyatakan bahwa bahasa politik pada hakikatnya adalah bahasa yang sarat strategi, manipulatif dalam kadar tertentu, dan penuh dengan kepentingan ideologis yang tersembunyi di balik struktur bahasanya (Wodak & Meyer, 2016). Fenomena ini menuntut analisis yang melampaui deskripsi linguistik permukaan dan memasuki dimensi sosial yang lebih luas.

Wacana politik sebagai praktik sosial tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang mengitarinya. Melalui pilihan kata tertentu, pemimpin politik dapat menormalisasi dominasi, mengarahkan opini publik, menciptakan citra diri, dan mengontrol interpretasi terhadap suatu isu. Van

Dijk (2018) menegaskan bahwa wacana merupakan salah satu sarana paling efektif untuk mereproduksi kekuasaan karena ia bekerja secara halus melalui proses kognitif dan interaksi sosial. Teks politik, terutama pidato, menjadi ruang strategis bagi elite politik untuk menciptakan narasi hegemonik yang kemudian diterima masyarakat sebagai kebenaran.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan metafora perjuangan, narasi historis, serta struktur kalimat yang menonjolkan inklusivitas sering dimanfaatkan untuk membangun solidaritas sekaligus memperkuat otoritas pemimpin (Grzywacz, 2013). Di sisi lain, politisi juga menggunakan strategi eksklusi dan inklusi melalui pronomina tertentu yang menghasilkan oposisi biner seperti “kita” versus “mereka,” sebuah strategi retorik yang dapat memperkuat polarisasi sosial (Ghazani, 2016). Pembingkai isu dan representasi kelompok tertentu dalam wacana politik tidak pernah netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan yang ingin dicapai oleh pembuat wacana.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks Indonesia. Sebagian penelitian lebih menekankan analisis retorika tanpa mengkaji dimensi praktik wacana dan konteks sosial yang turut membentuk proses produksi dan konsumsi teks (Latupeirissa et al., 2019). Padahal, analisis wacana kritis menuntut pemahaman holistik yang mencakup hubungan dialektis antara teks, praktik wacana, dan struktur sosial. Hal ini menjadi penting mengingat wacana politik Indonesia memiliki karakteristik khusus, misalnya penggunaan simbol budaya, religiusitas, serta narasi kebangsaan yang kuat.

Selain itu, dinamika politik nasional yang semakin dipengaruhi oleh media digital menambah kompleksitas dalam produksi dan penyebaran wacana politik. Narasi yang berkembang melalui pidato politik seringkali bergema kembali melalui media sosial, menciptakan lapisan baru konsumsi makna yang memperkuat atau bahkan mendistorsi pesan asli. Oleh karena itu, memahami bagaimana kekuasaan direpresentasikan dalam teks politik menjadi relevan untuk memperkuat literasi kritis masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perangkat linguistik dan strategi wacana yang digunakan politisi untuk membangun representasi kekuasaan dalam pidato politik. Artikel ini juga bertujuan mengisi kekosongan penelitian dengan mengaplikasikan kerangka tiga dimensi Fairclough secara komprehensif pada teks politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian analisis wacana kritis, sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan literasi politik publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif interpretatif berbasis Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Data berupa tiga teks pidato politik yang disampaikan pada acara politik tingkat nasional pada tahun 2023–2024. Pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi ideologis dan intensitas penggunaan strategi retorika. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, transkripsi teks, serta verifikasi silang menggunakan sumber media resmi. Analisis data mencakup tiga tahap: (1) analisis teks melalui identifikasi diksi, modalitas, metafora, dan struktur sintaksis; (2) analisis praktik wacana melalui penelusuran proses produksi dan distribusi teks; dan (3) analisis konteks sosial untuk mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi. Validitas diperkuat melalui triangulasi teori dan diskusi pakar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi kekuasaan dalam teks politik diwujudkan terutama melalui pemilihan diksi dan modalitas yang secara konsisten menekankan otoritas, kepastian, serta kendali atas situasi politik dan sosial. Pilihan diksi seperti menegaskan, menjamin, mengawal, atau mengatur tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan makna denotatif, tetapi juga berperan sebagai perangkat simbolik yang menempatkan aktor politik pada posisi hierarkis yang lebih tinggi dibandingkan

audiensnya. Penggunaan modalitas seperti harus, akan, dan pasti memperkuat kesan bahwa pemimpin memiliki kapasitas dan legitimasi penuh untuk menentukan arah kebijakan dan mengontrol perkembangan masa depan bangsa. Dengan demikian, bahasa menjadi instrumen halus yang menormalisasi hubungan kuasa yang tidak seimbang antara pemimpin politik dan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori van Dijk (2018), yang menegaskan bahwa bahasa dalam wacana politik tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga secara sistematis diarahkan untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu melalui manipulasi kognitif dan simbolik. Melalui pilihan kata yang tampak netral, politisi dapat membingkai isu publik dengan cara yang menguntungkan kelompok mereka, sekaligus membatasi ruang interpretasi audiens. Dengan kata lain, wacana politik bekerja untuk mengontrol pikiran (mind control) melalui proses penonjolan (emphasis) terhadap informasi tertentu, dan penghilangan (de-emphasis) terhadap informasi lain.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa politisi secara intens menggunakan metafora perjuangan, perjalanan, dan keluarga untuk membangun kedekatan emosional sekaligus memosisikan diri sebagai pemimpin visioner yang dekat dengan rakyat. Metafora perjuangan misalnya, membingkai situasi politik sebagai medan tempur yang membutuhkan keberanian dan kepemimpinan kuat, sehingga memperkuat citra politisi sebagai figur heroik. Metafora perjalanan digunakan untuk menggambarkan perkembangan bangsa sebagai proses panjang yang membutuhkan panduan dan arah yang jelas, sehingga secara implisit menempatkan pembicara sebagai pemandu utama dalam proses tersebut. Sementara itu, metafora keluarga memunculkan citra hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat, di mana pemimpin diposisikan sebagai sosok ayah atau ibu yang melindungi dan mengarahkan.

Strategi ini mendukung temuan Wodak (2019), yang menyatakan bahwa metafora tidak hanya berfungsi sebagai alat estetika dalam retorika, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk interpretasi publik terhadap realitas politik. Melalui metafora, isu kompleks disederhanakan menjadi gambaran konkret yang lebih mudah dipahami publik, sekaligus memunculkan afiliasi emosional yang kuat. Dengan demikian, metafora menjadi perangkat wacana yang sangat efektif dalam mengonstruksi legitimasi kekuasaan dan memperkuat citra pemimpin di mata masyarakat.

Analisis intertekstualitas memperlihatkan bahwa pidato politik sering kali mengutip slogan, semboyan nasional, kutipan konstitusi, maupun narasi historis sebagai strategi untuk memperluas legitimasi dan menghadirkan kesan bahwa pemimpin berada dalam satu garis kontinuitas dengan nilai-nilai kebangsaan. Rujukan terhadap narasi nasional seperti “persatuan,” “kedaulatan rakyat,” atau “keadilan sosial” berfungsi sebagai perangkat simbolik yang menghubungkan pesan politik dengan identitas kolektif bangsa. Melalui kutipan tersebut, politisi tidak hanya meminjam otoritas dari teks-teks yang dihormati publik, tetapi juga membangun citra keselarasan antara diri mereka dengan negara, seakan-akan kepentingan politik mereka merupakan perpanjangan dari kepentingan nasional. Intertekstualitas semacam ini bekerja untuk memperkuat legitimasi moral maupun ideologis, karena publik cenderung menerima pesan yang dikaitkan dengan nilai-nilai historis yang dianggap sakral.

Dalam praktik wacana, proses produksi pidato politik jarang bersifat spontan dan personal. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemimpin politik dengan konsultan komunikasi, penulis pidato profesional, dan tim strategis yang dengan sengaja memoles pesan agar sesuai dengan arah ideologis serta citra publik yang ingin dibangun. Proses ini mencakup analisis wacana oposisi, pemetaan isu publik, dan perumusan narasi yang disesuaikan dengan segmentasi audiens. Dengan demikian, pidato politik pada dasarnya merupakan produk diskursif yang dirancang secara strategis untuk mencapai efek persuasif tertentu, bukan sekadar ekspresi individual seorang pemimpin. Hal ini menegaskan bahwa wacana politik merupakan praktik terorganisir yang memanfaatkan pengetahuan linguistik, psikologis, dan media untuk mengonstruksi representasi realitas yang diinginkan.

Pada tingkat konteks sosial, ditemukan bahwa wacana politik secara konsisten mengukuhkan hierarki simbolik antara pemimpin dan rakyat melalui pilihan bahasa yang menempatkan pemimpin sebagai pusat kendali dan rakyat sebagai pihak yang diarahkan. Pengukuhan ini tidak hanya tercermin dari diksi yang mengandung nuansa superioritas—seperti “menginstruksikan,” “mengawal,” atau “menggerakkan rakyat”—tetapi juga muncul dalam cara struktur kalimat dibangun untuk menonjolkan pemimpin sebagai agen utama dalam setiap tindakan. Banyak pidato menggunakan konstruksi gramatikal yang menempatkan pemimpin pada posisi subjek aktif, sementara rakyat digambarkan sebagai objek yang menerima tindakan atau menjadi bagian dari agenda yang telah dirumuskan. Dengan demikian, struktur linguistik itu sendiri memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana pusat pengambilan keputusan berfokus pada figur pemimpin dan bukan pada partisipasi publik secara kolektif.

Dalam berbagai pernyataan politik, pemimpin sering diposisikan sebagai sosok visioner yang paling memahami arah pembangunan nasional, seolah-olah memiliki kapasitas analitis dan moral yang melebihi masyarakat umum. Pemimpin digambarkan sebagai individu yang mampu melihat “big picture,” membaca peluang global, dan memprediksi tantangan jangka panjang, sehingga memberikan legitimasi simbolik bahwa kendali pemerintahan memang seharusnya berada di tangan mereka. Pencitraan visioner ini tidak hanya memberi justifikasi terhadap kewenangan formal, tetapi juga menciptakan identitas simbolik bahwa pemimpin merupakan satu-satunya aktor yang layak menentukan masa depan bangsa. Dalam konteks inilah, pengawasan, pengaturan, dan instruksi yang diberikan pemimpin dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai bentuk kepemimpinan ideal.

Representasi semacam ini memperkuat konstruksi sosial bahwa kekuasaan berada pada satu titik sentral, di mana pemimpin berperan sebagai pusat orientasi dan arah. Rakyat, dalam narasi yang dihasilkan, ditempatkan pada posisi pasif, mengikuti arahan yang telah direncanakan tanpa diberi ruang untuk merumuskan alternatif atau memberikan kritik yang signifikan. Wacana semacam ini secara halus mengondisikan publik agar menerima hubungan kuasa yang bersifat top-down sebagai sesuatu yang alami, tidak dapat diubah, dan tidak perlu dipertanyakan. Pada akhirnya, struktur wacana tersebut bukan hanya mencerminkan pola kekuasaan yang ada, tetapi juga turut mereproduksi dan memperkuatnya melalui penggunaan bahasa yang sistematis dan persuasif.

Retorika pembangunan, misalnya, sering digunakan untuk menormalisasi hubungan kuasa tersebut dengan menggambarkan pemimpin sebagai arsitek masa depan bangsa, sementara rakyat diposisikan sebagai subjek yang harus mengikuti instruksi demi tercapainya kemajuan. Strategi ini bekerja melalui penggunaan bahasa yang menonjolkan keahlian, visi jangka panjang, dan kapasitas teknokratis pemimpin, sehingga menciptakan persepsi bahwa hanya otoritas tertentu yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah pembangunan nasional. Dalam banyak pidato politik, pembangunan dikemas dalam bentuk narasi heroik yang menempatkan pemimpin sebagai figur penyelamat yang mampu membawa negara keluar dari krisis dan menuju era kemajuan. Sementara itu, rakyat direpresentasikan sebagai kelompok yang membutuhkan bimbingan dan harus tunduk pada kebijakan yang telah dirancang secara top-down.

Narasi pembangunan umumnya menekankan urgensi perubahan dan pentingnya stabilitas, sehingga rakyat diarahkan untuk menerima keputusan pemerintah sebagai langkah final yang telah melalui pertimbangan matang dan tidak layak untuk diperdebatkan. Retorika semacam ini sering kali memanfaatkan istilah seperti “transformasi besar,” “lompatan kemajuan,” atau “agenda strategis nasional” yang tidak hanya membingkai pembangunan sebagai sesuatu yang mendesak, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Dengan mengasosiasikan pembangunan dengan kemajuan bersama dan masa depan generasi mendatang, wacana politik menempatkan rakyat pada posisi emosional yang membuat mereka lebih mudah menerima kebijakan meskipun kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, pembangunan bukan hanya proyek ekonomi atau sosial, tetapi juga perangkat retorik yang menciptakan pembenaran moral terhadap dominasi pemimpin. Dengan menampilkan pembangunan sebagai kebutuhan fundamental yang tidak dapat ditunda, pemimpin mendapatkan legitimasi untuk memperluas kewenangan, mengontrol anggaran, dan menentukan prioritas nasional tanpa membuka ruang partisipasi publik yang setara. Retorika pembangunan juga berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari ketimpangan struktural, dengan cara memusatkan narasi pada tujuan bersama yang seolah-olah inklusif dan universal.

Dengan menempatkan pembangunan sebagai agenda kolektif yang tidak boleh diganggu gugat, wacana tersebut mengurangi ruang bagi kritik dan memperkuat penerimaan terhadap struktur kuasa yang hierarkis. Kritik sering digambarkan sebagai hambatan terhadap kemajuan atau bahkan ancaman terhadap stabilitas nasional, sehingga oposisi atau pandangan alternatif menjadi terdorong ke pinggir ruang publik. Dalam kondisi ini, rakyat tidak hanya dibuat pasif, tetapi juga secara simbolik diminta untuk ikut menjaga legitimasi pemimpin melalui dukungan moral dan penerimaan terhadap agenda pembangunan. Pada akhirnya, retorika pembangunan berfungsi sebagai mekanisme ideologis yang menstabilkan relasi kuasa dengan memadukan bahasa teknokratis, simbolisme nasional, dan strategi persuasi yang mendalam.

Selain itu, narasi kebersamaan seperti “kita bergerak bersama” atau “rakyat dan pemerintah bersatu” secara halus menyamarkan ketimpangan relasi kuasa dengan menghadirkan ilusi kesetaraan, padahal struktur wacana tetap menempatkan pemimpin sebagai figur otoritatif yang menentukan arah gerak kolektif. Bahasa inklusif ini memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat bersifat horizontal, meskipun pada kenyataannya relasi tersebut tetap vertikal. Strategi retorik berbasis kebersamaan tersebut juga memiliki fungsi psikologis, yaitu membangun kedekatan emosional dan loyalitas publik, sehingga rakyat merasa menjadi bagian dari proyek besar yang digagas pemimpin.

Strategi retorik ini pada akhirnya berfungsi ganda: memperkuat legitimasi kepemimpinan dan mereduksi potensi resistensi publik dengan menciptakan citra harmoni sosial yang semu. Dengan menghadirkan kesan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat berlangsung dalam suasana keharmonisan dan kesepahaman, wacana politik secara efektif menutup ruang bagi munculnya pertanyaan kritis terhadap kebijakan atau arah kekuasaan. Retorika semacam ini bekerja dengan meminimalisasi wacana alternatif dan mengaburkan perbedaan pandangan, sehingga ketegangan atau konflik yang sebenarnya inheren dalam masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan “semangat kebersamaan.” Melalui pembentukan citra stabilitas simbolik yang menguntungkan pihak yang berkuasa, relasi kuasa yang timpang dapat dipertahankan tanpa perlu menggunakan mekanisme koersif secara langsung. Pembingkai hubungan pemimpin–rakyat sebagai relasi yang harmonis, kompak, dan sejalan mengalihkan perhatian publik dari ketimpangan struktural, ketidaksetaraan akses, serta berbagai bentuk dominasi yang bekerja secara terselubung, sehingga kritik mudah diposisikan sebagai tindakan yang “mengganggu kebersamaan” atau berpotensi merusak persatuan. Dengan demikian, wacana politik tidak hanya menjadi alat komunikasi yang menyampaikan gagasan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ideologis yang secara terus-menerus mereproduksi, menstabilkan, dan melegitimasi struktur kuasa yang ada melalui mekanisme simbolik yang halus namun efektif.

Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA) yang komprehensif sehingga mampu menggabungkan analisis linguistik dan analisis sosial secara utuh dalam memahami relasi kuasa yang termanifestasi dalam teks politik. Pendekatan ini memberikan kedalaman analitis karena tidak hanya memeriksa struktur bahasa pada level mikro—seperti diksi, modalitas, dan metafora—tetapi juga menghubungkannya dengan faktor-faktor makro seperti ideologi, praktik institusional, serta dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi produksi wacana. Selain itu, kekuatan penelitian ini semakin diperkuat oleh penggunaan data berupa pidato politik aktual yang memiliki

relevansi tinggi terhadap konteks politik kontemporer di Indonesia. Data yang autentik ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pemimpin politik membangun legitimasi dan memengaruhi opini publik melalui strategi retorika dan pilihan bahasa tertentu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tentang representasi kekuasaan dalam wacana politik Indonesia.

Namun, penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Salah satunya adalah jumlah data yang relatif terbatas, yaitu hanya bersumber dari beberapa pidato politik, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh terhadap seluruh bentuk wacana politik. Selain itu, fokus analisis yang hanya berpusat pada pidato lisan menyebabkan penelitian ini belum menangkap dinamika wacana yang berkembang pada ruang-ruang komunikasi lain, seperti media sosial, konferensi pers, wawancara televisi, atau debat politik, yang masing-masing memiliki karakteristik wacana tersendiri. Kehadiran media digital, misalnya, telah mengubah pola produksi dan konsumsi wacana politik secara signifikan—dengan gaya bahasa yang lebih informal, interaktif, dan responsif terhadap opini publik.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas jenis data yang dianalisis dan mempertimbangkan pendekatan multimodal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik wacana politik masa kini. Perkembangan teknologi komunikasi dan dinamika sosial-politik kontemporer menuntut analisis yang lebih holistik, karena wacana politik tidak lagi terbatas pada teks verbal yang disampaikan dalam pidato atau dokumen resmi, tetapi juga berlangsung dalam ruang publik yang semakin beragam dan interaktif. Dengan memperluas cakupan data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola wacana baru yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan linguistik konvensional.

Pendekatan multimodal memungkinkan peneliti mengkaji elemen non-verbal seperti gestur, intonasi, visual, dan penggunaan simbol-simbol politik, yang sering kali memiliki kontribusi besar dalam pembentukan makna dan representasi kekuasaan. Misalnya, gestur tangan, postur tubuh, hingga cara pemimpin menatap audiens dapat mengisyaratkan otoritas atau kedekatan emosional yang tidak selalu dapat ditangkap melalui analisis teks saja. Demikian pula, elemen visual seperti desain panggung, warna kampanye, dan latar simbolik dapat membantu memperkuat citra politik tertentu dan memengaruhi persepsi publik secara lebih subtil. Dengan menganalisis hubungan antara unsur verbal dan non-verbal, penelitian di masa mendatang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana kekuasaan diartikulasikan dan dinegosiasikan dalam berbagai konteks komunikasi.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan analisis wacana digital untuk menangkap bagaimana politisi membangun citra dan mempertahankan legitimasi melalui platform media sosial yang kini menjadi arena penting dalam komunikasi politik modern. Media sosial tidak hanya menjadi ruang penyebaran pesan, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan politisi membentuk identitas, membangun kedekatan semu dengan publik, dan memengaruhi opini secara cepat dan masif. Narasi politik di platform digital sering menggunakan strategi diskursif yang berbeda dari pidato formal, seperti penggunaan bahasa yang lebih personal, humor, atau visual yang dirancang untuk menarik perhatian. Dengan memasukkan analisis wacana digital, penelitian dapat mengungkap dinamika komunikasi politik yang lebih kompleks dan responsif terhadap kebutuhan representasi kekuasaan di era teknologi informasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa dalam teks politik berfungsi sebagai alat representasi kekuasaan yang bekerja melalui pemilihan kata, modalitas, metafora, dan intertekstualitas, sehingga setiap unsur linguistik tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi ideologis yang menguntungkan pihak berkuasa. Temuan ini menunjukkan bahwa politisi secara strategis memanfaatkan perangkat kebahasaan tersebut untuk membangun legitimasi, menciptakan citra kepemimpinan yang ideal, serta mengatur persepsi publik agar selaras dengan tujuan politik tertentu. Melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough, penelitian ini menegaskan bahwa teks politik

merupakan praktik sosial yang turut mereproduksi struktur sosial, mempertahankan dominasi, dan menormalisasi relasi kuasa yang hierarkis. Dengan demikian, bahasa tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang melandasi praktik komunikasi politik. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengkaji wacana politik secara multimodal dengan mempertimbangkan unsur visual, gestural, dan digital, serta memperluas konteks sosial pada media lain seperti media sosial, debat publik, atau kampanye visual guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bentuk-bentuk representasi kekuasaan dalam ranah politik kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ademilokun, M., & Taiwo, R. (2013). Discursive strategies in newspaper campaign advertisements for Nigeria's 2011 elections. *Discourse & Communication*, 7(4), 435–455.
- Atmawijaya, T. D. (2025). The strategic use of metaphor in political discourse: Critical metaphor analysis. *Russian Journal of Linguistics*, 29(2), 272–295.
- Caballero-Mengibar, A. (2015). Critical discourse analysis in the study of representation, identity politics and power relations: A multi-method approach. *Communication & Society*, 28(2), 39–54.
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Ghazani, A. Z. (2016). Study of persuasive strategies in selected American presidential speeches. *International Journal*, 3(2).
- Grzywacz, A. (2013). Constructing national identity in Indonesia: Experience for Europe. *Mozaik*, 13(1), 17–31.
- Mattei, L. R. W. (1998). Gender and power in American legislative discourse. *The Journal of Politics*, 60(2), 440–461.
- Revealing ideology of political speech. (n.d.). *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(2), 79–91.
- Rodan, G. (2013). Competing ideologies of political representation in Southeast Asia. In *People power in an era of global crisis* (pp. 104–125). Routledge.
- Setiawan, I., Laksana, I. K. D., Mahyuni, M., & Udayana, I. N. (2018). System of modality on the text of Indonesian presidential candidates debate on the period of 2014–2019. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 2(1), 157–170.
- Van Dijk, T. A. (2014). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of critical discourse analysis* (pp. 62–86). Sage.
- Wahyuni, F. (2019). Intertextuality and authority building in political speeches. *Journal of Critical Linguistics*, 4(2), 98–112.
- Wodak, R. (2006). Mediation between discourse and society: Assessing cognitive approaches in critical discourse analysis. *Discourse Studies*, 8(1), 179–190.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2015). *Methods of critical discourse studies*. Sage.